



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2024

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANAH LAUT**



<https://dp2kbp3a.tanahlautkab.go.id>



dp3ap2kbtanahlaut

3.2. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Tanah Laut

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap

Tabel 3.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Urusan Wajib						
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD} = \text{Rp } 464.372.809.052}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung APBD} = \text{Rp } 2.598.285.797.064} \times 100\%$	17,87%	DP3AP2KB BPKAD
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi} = 45}{\text{Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang menjadi kewenangan Kab/Kota} = 45} \times 100\%$	100%	DP3AP2KB
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan} = 19}{\text{Jumlah penduduk perempuan} = 90.955} \times 100.000$	20,89%	DP3AP2KB Disdukcapil

14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR= $5 \sum ASFR$	1,8	DP3AP2KB	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 47.088 ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur = 61.375	76,72%	DP3AP2KB	
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 2.733 ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur = 61.375	4,45%	DP3AP2KB	

Pelaihari, 31 Desember 2024

Mengetahui ,
Kepala Dinas P3AP2KB Tanah Laut



MARIA ULFAH, S.Psi., MM
NIP. 197911132008012008

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota

1). IKK Outcome No. 2.g.1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase anggaran responsif gender pada belanja langsung APBD
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah ARG pada Belanja Operasi dan Modal APBD}}{\text{Jumlah Seluruh Anggaran Belanja Operasi dan Modal di APBD}} \times 100\%$ $\frac{\text{Rp. 464.372.809.052}}{\text{Rp. 2.598.285.797.064}} \times 100\%$ 17,87%
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	• Pembilang Jumlah keseluruhan anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang ditetapkan pada belanja operasi dan belanja modal APBD di seluruh perangkat daerah kabupaten/kota. • Penyebut Jumlah keseluruhan belanja operasi dan belanja modal APBD.
Data Pendukung	:	• Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian program kegiatan dan anggaran pada masing-masing perangkat daerah kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pengelola Keuangan Daerah • Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian belanja operasi dan modal APBD kabupaten/kota. Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Regulasi	:	• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah • Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinasp3ap2kbtanahlaut@gmail.com

PENDATAAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA PERANGKAT DAERAH
YANG TELAH MENYERAHKAN DOKUMEN GAP DAN GBS

No	Nama Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Dinas Perhubungan	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Kelengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota	12.770.115.667
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan atau barang	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan atau Barang	627.320.000
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten	Penguatan Kerjasama Lintas Perangkat Daerah untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, dan DRPPA	115.402.528
			Penyediaan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	115.402.528
		Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.745.430
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	84.368.408
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi	146.357.870

			Perlindungan Anak	Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	187.977.799
		Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	57.515.568
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	44.725.815
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	427.392.032
3	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian Daerah	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	67.875.534
4	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	265.662.459.504
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kab/Kota	64.900.362
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kab/Kota	130.998.138
5	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.336.048
		Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Peredaran Benih/ Bibit Ternak	883.999.711
			Pengelolaan	Peningkatan	323.982.484

			Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	Kualitas SDG Hewan/Tanamana n	
		Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	326.590.633
		Pengendalian Kesehatan Hewan	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyelidikan Penyakit hewan dan zoonosis pada hewan	1.160.344.970
6	Kecamatan Tambang Ulang	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umuma	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUDN RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	99.931.305
7	Kecamatan Bumi Makmur	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umuma	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUDN RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	100.000.000
8	Kecamatan Bati-Bati	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2024	99.999.792
9	Dinas Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	57.258.856.200

			Kabupaten/Kota		
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	50.000.000
11	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.110.003.851
12	Satpol PP	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam satu Daerah		25.340.747.286
13	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	165.090.000
		Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	704.625.101
		Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		167.077.197
14	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilisasi Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilisasi Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	58.063.159.196
				Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilisasi Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	34.320.053.683
15	Dinas Pariwisata	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	21.550.000
16	Dinas Sosial	Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Pekerja Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	38.904.412
		Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang		3.612.000.000

			Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
TOTAL					464.372.809.052

Sumber : DP3AKB Kabupaten Tanah Laut

Lampirkan : Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PPRG

Berdasarkan LRA LKPD tahun 2024 didapatkan rincian anggaran sebagai berikut:

Belanja Operasi (Belanja Barang, Hibah, Bansos) : **464.372.809.052**

Belanja Modal : **2.598.285.797.064 x 100%**

Total : **17,87%**

Pelaihari, 13 Januari 2025
Kepala Dinas,


MARIA ULFAH, S.Psi, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197911132005012008

***Catatan:**

- LRA LKPD tahun 2024 unaudit/onface penarikan data pada tanggal 12 Januari 2025 (LK belum audited/belum diperiksa BPK)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

INSPEKTORAT

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Telp (0512) 22384 Pelaihari

Nomor : 700.1.2.7/ 293 /Insp-Irban II/2024 Pelaihari, 30 Desember 2024
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Monitoring Terhadap Kepada
Penyelenggaraan PPRG Pada Yth. PJ. Bupati Kab. Tanah
Tahap Keberadaan Dokumen Laut
Perencanaan Tahun 2024 Pada di-
Seluruh SKPD Kabupaten Tanah Pelaihari
Laut

Sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/883/Insp/2024 tanggal 24 Desember 2024, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Monitoring Terhadap Penyelenggaraan PPRG Pada Tahap Perencanaan Tahun 2024 pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanah Laut dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah beserta revisinya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan dilakukan kegiatan Monitoring pelaksanaan PPRG ini antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk Memastikan keandalan dan keabsahan Dokumen Perencanaan Pendukung Pelaksanaan PPRG; dan
- b. Untuk Memastikan Keberadaan kelengkapan Dokumen untuk mendukung penyelenggaraan Perencanaan PUG dan PPRG;
- c. Mendorong komitmen para pemangku kepentingan untuk mengupayakan percepatan PUG melalui PPRG.

3. Uraian Hasil Monitoring

Sampai dengan berakhirnya periode Monitoring Terhadap Dokumen dalam tahapan penyusunan PPRG Tahun 2024 pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanah Laut , diperoleh kondisi sebagai berikut :

- 1) Dari 40 (Empat Puluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanah Laut Dokumen PPRG pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut diketahui bahwa hanya 8 (delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut telah memenuhi ketersediaan dokumen *Gender Budget Statement* (GBS) yaitu 1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; 2. Dinas Ketahanan Pangan; 3. Dinas Komunikasi dan Informatika; 4. Dinas

- Pariwisata; 5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 6. Kecamatan Tambang Ulang; 7. Kecamatan Bati-Bati;
- 2) Dari 40 (Empat Puluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanah Laut Hanya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan anak yang Sudah Membuat Surat Keputusan *Focal Point* SKPD yang bertujuan a. Mempromosikan PengarusUtamaan Gender (PUG) pada Unit Kerja; b. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berprespektif Gender, c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD; d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD, e. Mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebilakan, program dan kegiatan pada unit kerja dan; f. Memfasilitasi penyusunan profil Gender pada setiap SKPD;

Demikian disampaikan laporan hasil monitoring Laporan Hasil Monitoring Terhadap Penyelenggaraan PPRG Pada Tahap Keberadaan Dokumen Perencanaan Tahun 2024 Pada Seluruh SKPD Kabupaten Tanah Laut

Inspektur,



Drs. Joko Wuryanto, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650116 199203 1 008

Tembusan;

1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Arsip.

2). IKK Outcome No. 2.g.2

Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi}}{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (penduduk usia kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$ $= \frac{45}{45} \times 100\%$ $= 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	- Pembilang jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani dan mendapatkan pendampingan meliputi layanan penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap anak, pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan - Penyebut jumlah penduduk di Kabupaten/Kota berusia kurang dari 18 tahun yang mengalami tindakan kekerasan.
Data Pendukung	:	- Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah anak korban kekerasan dan jenis kekerasan (a. secara fisik; b. seksual atau psikologis; c. termasuk ancaman tindakan tertentu; d. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi) yang ditangani (a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap anak; b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; c. Rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan; d. Penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan; dan e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan) dan mendapatkan pendampingan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah anak korban kekerasan usia kurang dari 18 tahun laki-laki dan perempuan yang ada di kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Regulasi	:	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinasp3ap2kbtanahlaut@gmail.com

JUMLAH ANAK (PENDUDUK USIA KURANG DARI 18 TAHUN) KORBAN
KEKERASAN YANG DITANGANI DAN DIDAMPINGI

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Jenis Kasus	Jenis Pelayanan yang Diberikan
1	Aph	P	16	Kekerasan Seksual/persetubuhan	Pemeriksaan Psikologis
2	N. A.	P	13	Kekerasan Seksual/persetubuhan	Pemeriksaan Psikologis
3	M. H.	P	17	Kekerasan Seksual/persetubuhan	Pemeriksaan Psikologis
4	D. A.P.F	L	17	Gangguan kepribadian	Pemeriksaan Psikologis
5	J. W.	P	15	Kekerasan Seksual/persetubuhan	Pemeriksaan Psikologis
6	Apl	P	12	Dugaan Korban Kekerasan Seksual/VCS	Pemeriksaan Psikologis
7	Oe	P	9	Kekerasan Seksual/Pencabulan	Pemeriksaan Psikologis
8	Z. A.	P	15	Masalah dengan Ibu Kandung	Mediasi terpisah
9	A. H.	L	14	Pesta Minuman Keras	Pembinaan, Pemeriksaan Psikologis
10	W. A.P	P	15	Kekerasan Seksual/persetubuhan	Pemeriksaan Psikologis
11	A. D. S.	L	6	Masalah perilaku	Pemeriksaan Psikologis
12	Shn	L	11	Anak pelaku pencurian	Pemeriksaan Psikologis
13	M. A. P.	L	11	Anak pelaku pencurian	Pemeriksaan Psikologis
14	Ad	P	14	Kekerasan Seksual/persetubuhan	Pemeriksaan Psikologis
15	M. R.	L	3	Dugaan anak yang diterlantarkan	RPS, pemeriksaan psikologis
16	A. Z.	P	1,5 bln	Dugaan anak yang diterlantarkan	RPS, pemeriksaan psikologis
17	A. K.	P	10	Kekerasan seksual/pelecehan, penelantaran	RPS, pemeriksaan psikologis
18	Nkm	P	15	Dugaan Kekerasan fisik/psikis	Penjangkauan, pemeriksaan psikologis
19	P. T. N.	P	11	Kekerasan Seksual/persetubuhan	Pemeriksaan Psikologis
20	M. J.B.	P	15	Kekerasan Seksual/perkosaan	Pemeriksaan Psikologis
21	S. P.	L	13	Korban Bullying	Pemeriksaan Psikologis
22	Mld	P	16	Kekerasan Seksual/persetubuhan	Pemeriksaan Psikologis
23	D. A.	P	11	Kekerasan Seksual/pelecehan	Pemeriksaan Psikologis
24	N. Y.	P	11	Kekerasan Seksual/pelecehan	Pemeriksaan Psikologis
25	P. A.	P	16	Kekerasan Seksual/persetubuhan	Pemeriksaan Psikologis

26	M. L. H.	L	12	Dugaan Kekerasan fisik/psikis	Mediasi
27	Ag	L	16	Anak Pelaku Kekerasan Seksual	Pemeriksaan Psikologis
28	Nht	P	12	Kekerasan Seksual/persetubuhan	Pemeriksaan Psikologis dan Kesehatan
29	S. N. A	P	15	Kekerasan Seksual/persetubuhan	Pemeriksaan Psikologis
30	M. A.	L	14	Konsumsi Minuman Keras	Asesmen awal, pembinaan
31	M. R. A.	L	14	Konsumsi Minuman Keras	Asesmen awal, pembinaan
32	A. A.	L	14	Konsumsi Minuman Keras	Asesmen awal, pembinaan
33	D. F.	P	17	Dugaan korban Perdagangan orang/TPPO	Pemeriksaan Psikologis
34	J. B.	P	14	Kekerasan Seksual/Persetubuhan	Pemeriksaan Psikologis
35	M. Al A.	L	8	Dugaan korban kekerasan verbal/psikis	Pemeriksaan Psikologis
36	M. A. R.	P	15	Kekerasan Seksual/Persetubuhan	Pemeriksaan Psikologis
37	E. N. A	P	16	Kekerasan Seksual/Persetubuhan	Pemeriksaan Psikologis
38	A. R.	L	17	Pelaku kekerasan seksual/Persetubuhan/ABH	Pemeriksaan Psikologis
39	P. M. S	P	15	Kekerasan Seksual/Persetubuhan	Pemeriksaan Psikologis
40	E. J.	P	16	Dugaan kekerasan fisik dan penelantaran	RPS, pemeriksaan psikologis
41	M. A. N. M.	L	5	Dugaan kekerasan fisik	Pemeriksaan Psikologis
42	Pt	P	16	Dugaan Kekerasan psikis	Pemeriksaan Psikologis
43	A. N.	P	13	Kekerasan Seksual/Persetubuhan	Pemeriksaan Psikologis
44	Dy	P	14	Kekerasan Seksual/Persetubuhan	Pemeriksaan Psikologis
45	N. L.	P	10	Kekerasan Seksual/Pencabulan	Pemeriksaan Psikologis
Jumlah		45 Anak			

Sumber : DP3AP2KB Kab. Tanah Laut

Pelaihari, 31 Desember 2024
Kepala Dinas,


MARIA ULFAH, S.Psi, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197911132005012008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Email : dinas3ap2kbtanahlaut@gmail.com

**DAFTAR KASUS KEKERASAN PADA ANAK
MENURUT BENTUK KEKERASAN SELAMA TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	UMUR	JUMLAH DAN JENIS KEKERASAN					
				FISIK	PSIKIS	SEKSUAL	EKSPLOITASI	TRAFFICKING	LAINNYA
1	Aph	P	16	-	-	1	-	-	-
2	N. A.	P	13	-	-	1	-	-	-
3	M. H.	P	17	-	-	1	-	-	-
4	D. A.P.F	L	17	-	-	-	-	-	1
5	J. W.	P	15	-	-	1	-	-	-
6	Apl	P	12	-	-	1	-	-	-
7	Oe	P	9	-	-	1	-	-	-
8	Z. A.	P	15	-	-	-	-	-	1
9	A. H.	L	14	-	-	-	-	-	1
10	W. A.P	P	15	-	-	1	-	-	-
11	A. D. S.	L	6	-	-	-	-	-	1
12	Shn	L	11	-	-	-	-	-	1
13	M. A. P.	L	11	-	-	-	-	-	1
14	Ad	P	14	-	-	1	-	-	-
15	M. R.	L	3	-	-	-	-	-	1
16	A. Z.	P	1,5 bln	-	-	-	-	-	1
17	A. K.	P	10	-	-	1	-	-	-
18	Nkm	P	15	1	-	-	-	-	-
19	P. T. N.	P	11	-	-	1	-	-	-
20	M. J.B.	P	15	-	-	1	-	-	-
21	S. P.	L	13	-	-	-	-	-	1
22	Mld	P	16	-	-	1	-	-	-
23	D. A.	P	11	-	-	1	-	-	-
24	N. Y.	P	11	-	-	1	-	-	-
25	P. A.	P	16	-	-	1	-	-	-
26	M. L. H.	L	12	1	-	-	-	-	-
27	Ag	L	16	-	-	-	-	-	1
28	Nht	P	12	-	-	1	-	-	-
29	S. N. A	P	15	-	-	1	-	-	-
30	M. A.	L	14	-	-	-	-	-	1
31	M. R. A.	L	14	-	-	-	-	-	1
32	A. A.	L	14	-	-	-	-	-	1
33	D. F.	P	17	-	-	-	-	-	1
34	J. B.	P	14	-	-	1	-	-	-
35	M. Al A.	L	8	-	1	-	-	-	-
36	M. A. R.	P	15	-	-	1	-	-	-
37	E. N. A	P	16	-	-	1	-	-	-
38	A. R.	L	17	-	-	-	-	-	1
39	P. M. S	P	15	-	-	1	-	-	-
40	E. J.	P	16	1	-	-	-	-	-

41	M. A. N. M.	L	5	1		-	-	-	-
42	Pt	P	16	-	1	-	-	-	-
43	A. N.	P	13	-	-	1	-	-	-
44	Dy	P	14	-	-	1	-	-	-
45	N. L.	P	10	-	-	1	-	-	-
JUMLAH				4	2	24	0	0	15

Pelaihari, 31 Desember 2024
Kepala Dinas,



MARIA ULFAH, S.Psi, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197911132005012008

3). IKK Outcome No. 2.g.3

Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$ $\frac{19}{90.955} \times 100.000$ $20,89$
Satuan Hasil	:	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan per 100.000
Definisi Operasional	:	- Pembilang Jumlah perempuan korban kekerasan yang berusia diatas 18 tahun dan/atau sudah menikah yang belum dan sudah ditangani dengan mendapatkan pendampingan meliputi layanan penanganan pengaduan/laporan korban, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial. - Penyebut Jumlah keseluruhan Perempuan yang berusia lebih dari 18 tahun dan/atau sudah menikah di kabupaten/kota.
Data Pendukung	:	- Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah perempuan korban kekerasan dan jenis kekerasan (a. Secara fisik; b. seksual atau psikologis; c. termasuk ancaman tindakan tertentu; d. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi) yang ditangani (a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan; b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan korban kekerasan; c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan korban kekerasan; d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan; dan e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan) dan mendapatkan pendampingan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan perempuan pada kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Regulasi	:	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinasp3ap2kbtanahlaut@gmail.com

REKAP KASUS KEKERASAN PEREMPUAN UPTD PPA
KABUPATEN/KOTA TANAH LAUT
TAHUN 2024

No	Nama	Umur	Jenis Kasus	Status	Penanganan	Konselor & Pendamping	Keterangan
1	Isn	42	KDRT / Kekerasan Psikis	Kawin	Konseling/pemeriksaan Psikologis, Rumah Perlindungan sementara, mediasi	Isella L. M.Psi.Psikolog Sri M. Astuti, Fitriani D. F.	
2	Mrn	26	Kekerasan Seksual/Persetubuhan	Kawin	Konseling/Pemeriksaan Psikologis	Isella L. M.Psi.Psikolog Sri M. Astuti, Fitriani D. F.	
3	N. P. A.	28	Perebutan Hak Asuh Anak	Cerai Hidup	Mediasi	Pahimah, Sri M. Astuti	
4	D.N. R.	20	Kekerasan Seksual/Persetubuhan	Belum Kawin	Konseling/Pemeriksaan Psikologis	Isella L. M.Psi.Psikolog Sri M. Astuti, Fitriani D. F	
5	S. F.	43	Dugaan Korban Kekerasan Seksual/VCS	Kawin	Konseling/Pemeriksaan Psikologis	Isella L. M.Psi.Psikolog Sri M. Astuti, Fitriani D. F	
6	Mar	43	Dugaan KDRT/Kekerasan Fisik	Kawin	Penjangkauan dan koordinasi Polres	Sri M. Astuti, Fitriani D. F	
7	F	24	Dugaan korban perempuan terlanter	Cerai Hidup	Konseling/pemeriksaan Psikologis, Rumah Perlindungan sementara, pemulangan.	Isella L. M.Psi.Psikolog Sri M. Astuti, Fitriani D. F	
8	R. R	25	Kekerasan psikis/istri pelaku pencabulan	Kawin	Konseling/Pemeriksaan Psikologis	Leli N. M, M.Psi. Psikolog Sri M. Astuti, Fitriani D. F	
9	Nrl	36	KDRT	Kawin	Konseling/Pemeriksaan Psikologis	Leli N. M, M.Psi. Psikolog Sri M. Astuti, Fitriani D. F	
10	F	43	KDRT	Kawin	Konseling/Pemeriksaan Psikologis	Isella L. M.Psi.Psikolog Sri M. Astuti, Fitriani D. F	
11	P. A. S	20	Konflik dengan orang tua	Cerai Hidup	Konseling/Pemeriksaan Psikologis	Isella L. M.Psi.Psikolog Sri M. Astuti, Fitriani D. F	

12	W. U	31	Dugaan korban kekerasan verbal/Psikis	Kawin	Konseling/Pemeriksaan Psikologis	Isella L. M.Psi.Psikolog Sri M. Astuti, Fitriani D. F	
13	C. H	40	Perebutan pengasuhan anak	Kawin	Menerima pengaduan dan konsultasi	Sri M. Astuti, Fitriani D. F	
14	Rmh	18	Dugaan korban kekerasan seksual	Belum Kawin	Konseling/Pemeriksaan Psikologis	Isella L. M.Psi.Psikolog Sri M. Astuti, Fitriani D. F	
15	S. K	30	Dugaan KDRT	Kawin	Menerima pengaduan dan konsultasi	Sri M. Astuti, Fitriani D. F	
16	P. L	30	KDRT	Kawin	Konseling/Pemeriksaan Psikologis	Isella L. M.Psi.Psikolog Sri M. Astuti, Fitriani D. F	
17	M. P. S.	46	Perebutan pengasuhan anak	Kawin	Mediasi	Isella L. M.Psi.Psikolog Sri M. Astuti, Fitriani D. F	
18	E. A.	33	Dugaan korban kekerasan psikis	Kawin	Menerima pengaduan dan konsultasi	Sri M. Astuti, Fitriani D. F	
19	M. S	24	Dugaan Kekerasan Berbasis Gender Online	Kawin	Menerima pengaduan dan konsultasi	Sri M. Astuti, Fitriani D. F	

Pelaihari, 31 Desember 2024
Kepala Dinas,


MARIA ULFAH, S.Psi, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197911132005012008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Kode Pos 70814 Telp. (0512) 21004 Pelaihari

Pelaihari, 20 Februari 2025

Nomor : 400.12.4.4/102/Disdukcapil/II/2025
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : **Data Penduduk**

Kepada Yth,

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanah Laut
di –

Pelaihari

Menindaklanjuti surat permohonan dari DP3AP2KB nomor: 100.1.7/126/DP3AP2KB/2025 tanggal 18 Februari 2025 Perihal Permintaan Data, terlampir kami sampaikan Data Penduduk dengan sumber data Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

Demikian disampaikan sebagai bahan selanjutnya.

Kepala Dinas,
Dr. Ir. H. AKHMAD HAIRIN, M.M., M.P
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19680129 199303 1 007





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814 Telp. (0512) 21004 Pelaihari

**JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN USIA DIATAS 18 TAHUN DAN/ATAU
SUDAH MENIKAH DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024**

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK
TAKISUNG	8,536
JORONG	8,837
PELAIHARI	19,883
KURAU	3,595
BATI BATI	11,579
PANYIPATAN	6,712
KINTAP	11,009
TAMBANG ULANG	4,765
BATU AMPAR	7,460
BAJUIN	5,096
BUMI MAKMUR	3,483
	90,955

Kepala Dinas,
Dr. Ir. H. AKHMAD HAIRIN, M.M., M.P
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19680129 199303 1 007

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut

1). IKK Outcome No. 2.m.1 TFR (Angka Kelahiran Total)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur angka kelahiran total (Total Fertility Rate)
Rumus	:	$TFR = 5 \sum_{i=1}^{i=7} ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times 1000$ TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24, ..., i=7 untuk kelompok Umur 45-49) K = Bilangan Konstanta biasanya 1000
Satuan Hasil	:	Rasio Angka kelahiran total (Total Fertility Rate)
Definisi Operasional	:	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate) adalah hasil perhitungan rata - rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa produksinya (15-49 tahun).
Data Pendukung	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian perhitungan angka kelahiran total (TFR). Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Regulasi	:	Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 108/KEP/B1/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Email : dinas3ap2kbtanahlaut@gmail.com

ANGKA KELAHIRAN TOTAL TAHUN 2024
DI KABUPATEN TANAH LAUT

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Umur (ΣP_{fi})	Jumlah Kelahiran (ΣB_i)	ASFR
1	15- 19	14,022	278	19,83
2	20 – 24	15,241	2103	137,98
3	25-29	13,313	1402	105,31
4	30 - 34	14,211	701	49,33
5	35 - 39	14,326	488	34,06
6	40 - 44	15,122	56	3,70
7	45 - 49	13,527	39	2,88
JUMLAH		99,762	5,067	353,10

Perhitungan : ASFR

$$= \frac{\Sigma B_i}{\Sigma P_{fi}} \times 1000$$
$$= 353,10$$

Keterangan :

B_i = jumlah kelahiran di dalam kelompok umur selama 1 tahun.

P_{fi} = jumlah perempuan kelompok umur pada suatu tahun tertentu.

Perhitungan : TFR

$$= \frac{ASFR \times 5 \text{ (interval kelompok umur)}}{1000}$$
$$= \frac{353,10 \times 5 \text{ (interval kelompok umur)}}{1000}$$
$$= 1,8$$

Pelaihari, 31 Desember 2024
Kepala Dinas,


MARIA ULFAH, S.Psi, MM
NIP. 197911132005012008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari 70814
Email : dinasp3ap2kbtanahlaut@gmail.com

DATA PERSALINAN MENURUT GOLONGAN UMUR
TAHUN 2024

KABUPATEN	PERSALINAN MENURUT UMUR							TOTAL
TANAH LAUT	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	5,067
	278	2,103	1,402	701	488	56	39	

Pelaihari, 31 Desember 2024
Kepala Dinas,


MARIA ULFAH, S.Psi., M.M
NIP. 197911132005012008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Email : dinasp3ap2kbtanahlaut@gmail.com

JUMLAH KELAHIRAN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR TAHUN 2024

NO	PUSKESMAS	JUMLAH KELAHIRAN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR						
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
1	PANYIPATAN	10	39	34	41	23	9	2
2	BATAKAN	25	88	45	5	2	2	0
3	JORONG	9	85	43	49	27	7	1
4	ASAM-ASAM	27	101	54	56	82	4	9
5	TAJAU PECAH	9	91	36	18	3	2	0
6	DURIAN BUNGKUK	17	67	37	29	37	2	5
7	KINTAP	33	131	72	167	59	1	3
8	SUNGAI CUKA	16	67	35	64	95	2	3
9	PELAIHARI	20	134	251	61	40	4	3
10	SUNGAI RIAM	2	44	11	18	2	1	0
11	ANGSAU	5	67	257	38	30	2	4
12	PANGGUNG	3	79	68	24	3	1	0
13	TANJUNG HABULU	14	32	23	5	11	2	0
14	TIRTA JAYA	15	48	84	18	13	2	0
15	TAKISUNG	23	243	72	28	21	2	3
16	BATI-BATI	13	156	44	13	5	2	2
17	KAIT-KAIT	5	51	23	7	3	2	0
18	BENTOK KAMPUNG	21	185	45	30	5	3	1
19	TAMBANG ULANG	10	160	73	8	8	3	1
20	KURAU	2	33	15	3	2	1	0
21	PADANG LUAS	7	90	35	3	3	1	0
22	BUMI MAKMUR	10	112	45	16	14	1	2
TOTAL		278	2103	1402	701	488	56	39

Sumber : Register pada masing-masing Puskesmas di Kabupaten Tanah Laut

Pelaihari, 31 Desember 2024
Kepala Dinas,


MARIA ULFAH, S.Psi., M.M
NIP. 197911132005012008

2). IKK Outcome No. 2.m.2

Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern
Rumus	:	$= \frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$ $= \frac{47.088}{61.375} \times 100$ $= 76,72\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	• Pembilang Seluruh jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat kontrasepsi terus-menerus dengan metode modern seperti kondom, suntik, pil, AKDR, MOW, MOP, Implan dan MAL untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan. • Penyebut Jumlah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) di wilayah kabupaten/kota.
Data Pendukung	:	• Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar peserta KB aktif modern per kecamatan di kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. • Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah pasangan usia subur di wilayah kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Regulasi	:	• Perka BKKBN RI No. 1 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinasp3ap2kbtanahlaut@gmail.com

JUMLAH PESERTA KB AKTIF MODERN TAHUN 2024
DI KABUPATEN/KOTA TANAH LAUT

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB AKTIF	METODE KONTRASEPSI MODERN									METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL
			SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI	MAL	TOTAL	
1	2	3=12+13	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Σ(4-11)	13
01	TAKISUNG	5673	2427	2770	49	256	45	4	117	0	5668	5
02	JORONG	4695	2987	1071	71	411	49	1	87	4	4681	14
03	PELAIHARI	8136	4635	2347	103	590	216	13	207	2	8113	23
04	KURAU	2434	1528	685	25	157	13	5	19	0	2432	2
05	BATI BATI	6135	2920	2498	46	468	76	0	118	0	6126	9
06	PANYIPATAN	3802	2406	734	89	462	46	1	57	1	3796	6
07	KINTAP	4747	2831	1317	10	366	61	11	132	5	4733	14
08	TAMBANG ULANG	2727	1322	992	43	293	20	2	51	3	2726	1
09	BATU AMPAR	3817	2107	910	83	378	137	6	184	0	3805	12
10	BAJUIN	2931	1221	1040	46	344	139	2	125	1	2918	13
11	BUMI MAKMUR	2114	999	942	33	93	3	2	18	0	2090	24
JUMLAH TOTAL		47211	25383	15306	598	3818	805	47	1115	16	47088	123

Pelaihari, 31 Desember 2024
Kepala Dinas,

MARIA ULFAH, S.Psi, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197911132005012008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinasp3ap2kbtanahlaut@gmail.com

JUMLAH PESERTA KB AKTIF MODERN TAHUN 2024
DI KABUPATEN/KOTA TANAH LAUT

NO	KECAMATAN	JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS)
01	TAKISUNG	6940
02	JORONG	6170
03	PELAIHARI	11122
04	KURAU	3036
05	BATI BATI	7774
06	PANYIPATAN	4714
07	KINTAP	6853
08	TAMBANG ULANG	3641
09	BATU AMPAR	4907
10	BAJUIN	3618
11	BUMI MAKMUR	2600
JUMLAH TOTAL		61375

Pelaihari, 31 Desember 2024
Kepala Dinas,


MARIA ULFAH, S.Psi, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197911132005012008

3). IKK Outcome No. 2.m.3

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)
Rumus	:	$= \frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100$ $= \frac{2.733}{61.375} \times 100\%$ $= 4,45\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Definisi Operasional	:	• Pembilang Seluruh jumlah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) yang tidak menggunakan alat kontrasepsi karena ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi di wilayah kabupaten/kota. • Penyebut Seluruh jumlah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) di wilayah kabupaten/kota.
Data Pendukung	:	• Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani (<i>unmet need</i>) di wilayah kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. • Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah pasangan usia subur di wilayah kabupaten/kota. Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Regulasi	:	• Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinasp3ap2kbtanahlaut@gmail.com

**JUMLAH PESERTA PUS, PESERTA KB, BUKAN PESERTA KB JANUARI SAMPAI
DESEMBER TAHUN 2024
KABUPATEN/KOTA TANAH LAUT**

No	Kecamatan	PUS Bukan Peserta KK				
		Hamil	IAS	IAT	TIAL	UNMETNEED (IAT+TIAL)
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1	TAKISUNG	68	366	82	205	287
2	JORONG	0	477	100	209	309
3	PELAIHARI	26	1299	182	469	651
4	KURAU	5	182	26	56	82
5	BATI BATI	1	537	82	171	253
6	PANYIPATAN	20	270	60	83	146
7	KINTAP	13	483	225	297	522
8	TAMBANG ULANG	31	281	97	124	221
9	BATU AMPAR	0	348	48	116	164
10	BAJUIN	0	210	11	32	43
11	BUMI MAKMUR	0	123	11	44	55
Jumlah		164	4576	924	1806	2733

Keterangan

1. PUS = Pasangan Usia Subur
2. IAS = Ingin Anak Segera
3. IAT = Ingin Anak Tunda
4. TIAL = Tidak Ingin Anak Lagi
5. Unmetneed = PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi

Pelaihari, 31 Desember 2024
Kepala Dinas,

MARIA ULFAH, S.Psi, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197911132005012008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Email : dinas3ap2kbtanahlaut@gmail.com

JUMLAH PESERTA KB AKTIF MODERN TAHUN 2024
DI KABUPATEN/KOTA TANAH LAUT

NO	KECAMATAN	JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS)
01	TAKISUNG	6940
02	JORONG	6170
03	PELAIHARI	11122
04	KURAU	3036
05	BATI BATI	7774
06	PANYIPATAN	4714
07	KINTAP	6853
08	TAMBANG ULANG	3641
09	BATU AMPAR	4907
10	BAJUIN	3618
11	BUMI MAKMUR	2600
JUMLAH TOTAL		61375

Pelaihari, 31 Desember 2024
Kepala Dinas,


MARIA ULFAH, S.Psi, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197911132005012008



PEMERINTAHAN KAB. TANAH LAUT

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	16.135.378.520,20	14.853.671.398,00	92,06	14.204.698.932,00
5.1	BELANJA OPERASI	15.208.785.340,20	14.018.821.878,00	92,18	12.785.239.527,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.127.547.393,00	4.330.885.698,00	84,46	4.410.558.631,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.427.959.749,00	2.244.179.688,00	92,43	2.248.227.273,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.643.701.654,00	1.580.329.714,00	96,14	1.583.116.700,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.599.490.774,00	1.551.741.714,00	97,01	1.583.116.700,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	44.210.880,00	28.588.000,00	64,66	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	113.490.398,00	94.096.992,00	82,91	98.832.012,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	107.139.998,00	90.895.136,00	84,84	98.832.012,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.350.400,00	3.201.856,00	50,42	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	80.806.908,00	66.655.000,00	82,49	96.130.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	80.806.908,00	66.655.000,00	82,49	96.130.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	65.710.002,00	50.160.000,00	76,34	56.985.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	62.470.002,00	46.920.000,00	75,11	56.985.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.240.000,00	3.240.000,00	100,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	49.299.802,00	44.995.000,00	91,27	43.670.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	49.100.002,00	44.815.000,00	91,27	43.670.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	199.800,00	180.000,00	90,09	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	67.155.200,00	58.587.780,00	87,24	62.063.940,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	63.828.800,00	56.922.120,00	89,18	62.063.940,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.326.400,00	1.665.660,00	50,07	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	238.462.382,00	218.892.327,00	91,79	170.206.888,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	235.870.382,00	218.892.327,00	92,80	170.206.888,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.592.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	35.630,00	21.010,00	58,97	18.544,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	32.396,00	20.465,00	63,17	18.544,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.234,00	545,00	16,85	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	141.873.808,00	117.402.972,00	82,75	124.252.755,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	138.245.008,00	115.172.739,00	83,31	124.252.755,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.628.800,00	2.230.233,00	61,46	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.536.000,00	3.259.716,00	71,86	3.237.847,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.320.000,00	3.197.967,00	74,03	3.237.847,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	216.000,00	61.749,00	28,59	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.338.000,00	9.779.177,00	73,32	9.713.587,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.960.000,00	9.593.930,00	74,03	9.713.587,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	378.000,00	185.247,00	49,01	0,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	9.549.965,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	9.549.965,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.699.587.644,00	2.086.706.010,00	77,30	2.162.331.358,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.198.912.638,00	1.706.412.170,00	77,60	1.738.352.364,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.155.522.005,00	1.679.809.007,00	77,93	1.738.352.364,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	43.390.633,00	26.603.163,00	61,31	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	500.675.006,00	380.293.840,00	75,96	423.978.994,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	500.675.006,00	380.293.840,00	75,96	423.978.994,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.081.237.947,20	9.687.936.180,00	96,10	8.374.680.896,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.950.447.900,20	1.826.076.116,00	93,62	1.603.608.078,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.950.447.900,20	1.826.076.116,00	93,62	1.603.608.078,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.536.000,00	3.500.000,00	98,98	3.506.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.640.015,00	2.634.000,00	99,77	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	316.334.657,00	272.335.468,00	86,09	191.139.533,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	25.491.458,00	22.866.790,00	89,70	22.620.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	26.836.532,00	16.703.408,00	62,24	16.815.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	14.876.798,00	12.721.500,00	85,51	16.578.835,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.429.558,00	3.062.100,00	89,29	2.002.950,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	115.207.400,00	103.840.000,00	90,13	13.050.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.750.356,00	4.279.200,00	90,08	0,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.590.750,00	1.535.000,00	96,50	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	400.661.492,20	386.425.250,00	96,45	38.826.260,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	4.310.944,00	3.846.400,00	89,22	483.792.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00	4.312.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	204.675.000,00	201.075.000,00	98,24	113.925.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	25.100.000,00	12.190.000,00	48,57	3.350.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	709.664.940,00	691.292.000,00	97,41	690.690.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	17.094.000,00	15.370.000,00	89,91	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	18.648.000,00	16.800.000,00	90,09	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.288.726.372,00	5.083.557.129,00	96,12	4.993.619.589,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.974.786.000,00	4.776.313.829,00	96,01	4.948.916.587,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	296.350.000,00	278.100.000,00	93,84	145.080.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.223.550.000,00	2.222.509.000,00	99,95	1.965.195.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	486.000.000,00	476.700.000,00	98,09	306.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	220.214.000,00	200.739.931,00	91,16	169.409.702,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00	385.700.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.091.028.000,00	981.628.000,00	89,97	970.710.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	27.150.000,00	26.700.000,00	98,34	1.475.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	78.978.000,00	78.978.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	23.574.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	30.950.000,00	30.950.000,00	100,00	17.024.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.666.000,00	3.100.000,00	66,44	2.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	0,00	0,00	0,00	800.378.778,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	18.000.000,00	7.367.400,00	40,93	8.286.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	141.500.000,00	129.106.970,00	91,24	91.117.750,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	66.000.000,00	50.034.528,00	75,81	48.965.857,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	26.288.472,00	23.874.900,00	90,82	26.720.802,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	23.520.000,00	22.060.500,00	93,79	24.658.544,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.230.432,00	890.388,00	72,36	916.558,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.538.040,00	924.012,00	60,08	1.145.700,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.656.900,00	12.256.900,00	96,84	6.820.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.281.900,00	4.281.900,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	3.175.000,00	3.095.000,00	97,48	1.220.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	5.200.000,00	4.880.000,00	93,85	5.600.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	45.350.000,00	42.057.000,00	92,74	11.162.200,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	2.900.000,00	2.857.000,00	98,52	1.962.200,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	42.450.000,00	39.200.000,00	92,34	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	229.645.000,00	229.054.500,00	99,74	0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	219.645.000,00	219.645.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	9.409.500,00	94,10	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	185.690.675,00	179.040.658,00	96,42	128.506.300,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	149.400.000,00	147.213.658,00	98,54	128.506.300,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.000.000,00	34.464.761,00	98,47	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	103.000.000,00	102.748.897,00	99,76	119.635.050,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	3.521.250,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	4.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.900.000,00	2.500.000,00	64,10	900.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	450.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	36.290.675,00	31.827.000,00	87,70	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	30.740.675,00	26.827.000,00	87,27	0,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	5.550.000,00	5.000.000,00	90,09	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.537.023.000,00	2.480.362.277,00	97,77	1.613.246.929,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.537.023.000,00	2.480.362.277,00	97,77	1.613.246.929,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	491.888.000,00	485.242.277,00	98,65	325.056.929,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.045.135.000,00	1.995.120.000,00	97,55	1.288.190.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	119.350.000,00	118.900.000,00	99,62	35.700.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	119.350.000,00	118.900.000,00	99,62	35.700.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	108.250.000,00	108.250.000,00	100,00	25.500.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	11.100.000,00	10.650.000,00	95,95	10.200.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	15.208.785.340,20	14.018.821.878,00	92,18	12.785.239.527,00
5.2	BELANJA MODAL	926.593.180,00	834.849.520,00	90,10	1.419.459.405,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	910.775.680,00	822.174.520,00	90,27	893.912.405,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.632.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	1.632.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	0,00	0,00	1.632.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	132.622.164,00	119.684.520,00	90,24	480.439.684,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	59.118.089,00	55.136.520,00	93,27	15.535.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	14.118.090,00	12.719.000,00	90,09	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	44.999.999,00	42.417.520,00	94,26	15.535.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	73.504.075,00	64.548.000,00	87,82	464.904.684,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	14.205.780,00	12.798.000,00	90,09	307.346.801,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	6.254.793,00	5.500.000,00	87,93	149.272.883,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	670.827,00	650.000,00	96,90	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	52.372.675,00	45.600.000,00	87,07	8.285.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	15.367.950,00	14.300.000,00	93,05	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	15.367.950,00	14.300.000,00	93,05	0,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	15.367.950,00	14.300.000,00	93,05	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	90.865.588,00	82.210.000,00	90,47	411.840.721,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	78.378.088,00	70.850.000,00	90,40	307.795.721,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	78.378.088,00	70.850.000,00	90,40	307.795.721,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.487.500,00	11.360.000,00	90,97	104.045.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	12.487.500,00	11.360.000,00	90,97	104.045.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	671.919.978,00	605.980.000,00	90,19	0,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	671.919.978,00	605.980.000,00	90,19	0,00
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	671.919.978,00	605.980.000,00	90,19	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.817.500,00	12.675.000,00	80,13	525.547.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	525.547.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	525.547.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	498.250.000,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	27.297.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	15.817.500,00	12.675.000,00	80,13	0,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	15.817.500,00	12.675.000,00	80,13	0,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	15.817.500,00	12.675.000,00	80,13	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	926.593.180,00	834.849.520,00	90,10	1.419.459.405,00
	JUMLAH BELANJA	16.135.378.520,20	14.853.671.398,00	92,06	14.204.698.932,00
	SURPLUS/DEFISIT	(16.135.378.520,20)	(14.853.671.398,00)	92,06	(14.204.698.932,00)

Kab. Tanah Laut, 03 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak

EKO TRIANTO, S.Sos
NIP. 196706011994011002

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							Perubahan DPA-SKPD
PEMERINTAH KAB. TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor : DPPA/A.3/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2024							
Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah							
Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	1		BELANJA OPERASI	Rp11.120.919.493,00	Rp15.208.785.340,20	Rp4.087.865.847,20	26.88
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp5.427.547.393,00	Rp5.127.547.393,00	(Rp300.000.000,00)	(5.85)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.693.372.100,00	Rp10.081.237.947,20	Rp4.387.865.847,20	43.53
5	2		BELANJA MODAL	Rp686.879.476,00	Rp926.593.180,00	Rp239.713.704,00	25.87
5	2	02	Belanja Modal	Rp667.898.476,00	Rp910.775.680,00	Rp242.877.204,00	26.67

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
			Peralatan dan Mesin				
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp18.981.000,00	Rp15.817.500,00	(Rp3.163.500,00)	(20.00)
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)				Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Pelaihari, Tanggal 23 September 2024 KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK <u>EKO TRIANTO, S.Sos</u> NIP. 196706011994011002 Mengesahkan, PPKD <u>MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si</u>	
Januari		Rp0,00	Januari	Rp6.183.098.809,00			
Februari		Rp0,00	Februari	Rp1.171.994.665,00			
Maret		Rp0,00	Maret	Rp854.030.856,00			
April		Rp0,00	April	Rp2.136.054.017,00			
Mei		Rp0,00	Mei	Rp828.652.994,00			
Juni		Rp0,00	Juni	Rp1.109.541.997,00			
Juli		Rp0,00	Juli	Rp1.047.668.285,00			

Agustus		Rp0,00	Agustus	Rp505.149.106,00	NIP. 196612271987031002
September		Rp0,00	September	Rp950.776.346,20	
Oktober		Rp0,00	Oktober	Rp960.300.621,00	
November		Rp0,00	November	Rp321.282.430,00	
Desember		Rp0,00	Desember	Rp66.828.394,00	
Jumlah		Rp0,00	Jumlah	Rp16.135.378.520,20	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama		NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	drh. Suparmi, M.S		196809111995032003	Ketua	
2.	Muhammad Darmin, S.IP, M.Si		196612271987031002	Wakil Ketua I	
3.	Ismail Fahmi, SE, MT		197311281998031008	Wakil Ketua II	
4.	Drs. Rudy Ismanto, M.Si		196809161990101001	Wakil Ketua III	
5.	Safarin, S.IP, M.Si		196904261990101001	Wakil Ketua IV	
6.	H. Hairul Rijal, S.Sos, M.Si		197002171990091001	Wakil Ketua V	
7.	Andris Evony, S.STP, M.Si		197909281997111001	Wakil Ketua VI	
8.	Drs. Gatot Subagio		196410101986021012	Anggota	
9.	Gentry Yuliantono, SE		196607081993031002	Anggota	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
10.	Akhmad Zaini Noor, ST	197611211997031001	Wakil Koordinator I	
11.	Hj. Iin Herlina, S.Sos, MT	196610251986022002	Anggota	
12.	Septy Rina Kumala Sari, SE, M.E, AK	197709212003122005	Anggota	
13.	Andi Mashabi, AP	197606231995111001	Anggota	
14.	Alfirial, SH, MH	197502031999032008	Anggota	
15.	Yulis Shairi, ST	197807252008031001	Anggota	
16.	Rika Amalia, S.STP, M.Si	198403202002122002	Anggota	
17.	Heru Purwanto, S.AP	197404271995031003	Koordinator	
18.	Alamsyah, SE	196901051993031011	Anggota	
19.	Paimun, ST	196905122007011032	Anggota	
20.	Akhmad Zaini Noor, ST	197611211997031001	Anggota	
21.	Kasnu, S.Sos	196806221990021001	Anggota	
22.	Yudi Sri Wantoro, SP	197507312007011011	Anggota	
23.	Guntoro. S.Sos	197609172006041018	Anggota	
24.	Afrizal Akbar, SH	198104032002121008	Anggota	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
25.	Sri Hadi, S.ST, MT	197409101999031005	Anggota	
26.	Hj. Isna Safriani, S.Sos	197303291994032007	Anggota	
27.	Indera Gunawan, A.Md	198205102006041014	Wakil Koordinator II	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								Perubahan DPA-SKPD
PEMERINTAH KAB. TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024								
Nomor : DPPA/A.3/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2024								
Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah								
Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)		
						(Rp)	(%)	
5	1		BELANJA OPERASI	Rp11.120.919.493,00	Rp15.208.785.340,20	Rp4.087.865.847,20	26.88	
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp5.427.547.393,00	Rp5.127.547.393,00	(Rp300.000.000,00)	(5.85)	
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.693.372.100,00	Rp10.081.237.947,20	Rp4.387.865.847,20	43.53	
5	2		BELANJA MODAL	Rp686.879.476,00	Rp926.593.180,00	Rp239.713.704,00	25.87	
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp667.898.476,00	Rp910.775.680,00	Rp242.877.204,00	26.67	
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp18.981.000,00	Rp15.817.500,00	(Rp3.163.500,00)	(20.00)	

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Pelaihari, Tanggal 19 September 2024 Pit. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK GENTRY YULIANTONO, SE NIP. 196607081993031002 Mengesahkan, PPKD <u>MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si</u> NIP. 196612271987031002
Januari	Rp0,00	Januari	Rp6.183.098.809,00	
Februari	Rp0,00	Februari	Rp1.171.994.665,00	
Maret	Rp0,00	Maret	Rp854.030.856,00	
April	Rp0,00	April	Rp2.136.054.017,00	
Mei	Rp0,00	Mei	Rp828.652.994,00	
Juni	Rp0,00	Juni	Rp1.109.541.997,00	
Juli	Rp0,00	Juli	Rp1.047.668.285,00	
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp505.149.106,00	
September	Rp0,00	September	Rp950.776.346,20	
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp960.300.621,00	
November	Rp0,00	November	Rp321.282.430,00	
Desember	Rp0,00	Desember	Rp66.828.394,00	
Jumlah	Rp0,00	Jumlah	Rp16.135.378.520,20	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	drh. Suparmi, M.S	196809111995032003	Ketua	
2.	Muhammad Darmin, S.IP, M.Si	196612271987031002	Wakil Ketua I	
3.	Ismail Fahmi, SE, MT	197311281998031008	Wakil Ketua II	
4.	Drs. Rudy Ismanto, M.Si	196809161990101001	Wakil Ketua III	
5.	Safarin, S.IP, M.Si	196904261990101001	Wakil Ketua IV	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
6.	H. Hairul Rijal, S.Sos, M.Si	197002171990091001	Wakil Ketua V	
7.	Andris Evony, S.STP, M.Si	197909281997111001	Wakil Ketua VI	
8.	Drs. Gatot Subagio	196410101986021012	Anggota	
9.	Gentry Yuliantono, SE	196607081993031002	Anggota	
10.	Akhmad Zaini Noor, ST	197611211997031001	Wakil Koordinator I	
11.	Hj. lin Herlina, S.Sos, MT	196610251986022002	Anggota	
12.	Septy Rina Kumala Sari, SE, M.E, AK	197709212003122005	Anggota	
13.	Andi Mashabi, AP	197606231995111001	Anggota	
14.	Alfirial, SH, MH	197502031999032008	Anggota	
15.	Yulis Shairi, ST	197807252008031001	Anggota	
16.	Rika Amalia, S.STP, M.Si	198403202002122002	Anggota	
17.	Heru Purwanto, S.AP	197404271995031003	Koordinator	
18.	Alamsyah, SE	196901051993031011	Anggota	
19.	Paimun, ST	196905122007011032	Anggota	
20.	Akhmad Zaini Noor, ST	197611211997031001	Anggota	
21.	Kasnu, S.Sos	196806221990021001	Anggota	
22.	Yudi Sri Wantoro, SP	197507312007011011	Anggota	
23.	Guntoro. S.Sos	197609172006041018	Anggota	
24.	Afrizal Akbar, SH	198104032002121008	Anggota	
25.	Sri Hadi, S.ST, MT	197409101999031005	Anggota	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
26.	Hj. Isna Safriani, S.Sos	197303291994032007	Anggota	
27.	Indera Gunawan, A.Md	198205102006041014	Wakil Koordinator II	